



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Dampak Praktik *Land Grabbing* untuk Pembangunan Ekonomi
terhadap Kondisi *Human Security* Masyarakat India**

Skripsi

Oleh

Fransiska Andita

2016330196

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Dampak Praktik *Land Grabbing* untuk Pembangunan Ekonomi
terhadap Kondisi *Human Security* Masyarakat India**

Skripsi

Oleh

Fransiska Andita

2016330196

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Fransiska Andita
Nomor Pokok : 2016330196
Judul : Dampak Praktik *Land Grabbing* terhadap Kondisi *Human Security*
Masyarakat India

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 29 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

:

Sekretaris

Mangadar Situmorang, Ph.D.

:

Anggota

Vrameswari Omega W., .SIP., M.Si.(Han)

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiska Andita

NPM : 2016330196

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Dampak *Land Grabbing* untuk Pembangunan Ekonomi terhadap

Kondisi *Human Security* Masyarakat India

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 22 Juli 2020



Fransiska Andita

Abstrak

Nama : Fransiska Andita

NPM : 2016330196

Judul Skripsi : Dampak Praktik *Land Grabbing* untuk Pembangunan Ekonomi terhadap Kondisi *Human Security* Masyarakat India

Penelitian ini ditujukan untuk menyusun sebuah gambaran umum mengenai dampak dari praktik *land grabbing* yang dilakukan untuk keperluan pembangunan ekonomi suatu negara terhadap kondisi sosial masyarakat. Untuk melengkapi kajian sebelumnya terkait *land grabbing* yang berfokus pada aspek ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia, penulis berupaya untuk menyusun gambaran umum mengenai dampak *land grabbing* melalui teori *critical security studies* dan kacamata *human security*. *Critical security studies* dan *human security* menekankan pada bagaimana keamanan manusia perlu menjadi fokus dari proses negara membangun kekuatan dan/atau menjaga keamanan negara. Selain itu, menggunakan konsepsi ‘pembangunan’ yang holistik dari PBB dan konsep ‘tanah’ sebagai elemen dari pembangunan, penulis hendak melihat bagaimana pembangunan nasional yang berfokus pada ekonomi mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan masyarakat secara individu atau kelompok. Dilema tersebut juga dihadapi oleh India, yang merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan juga berbagai masalah sosial seperti konflik tanah. ‘Pembangunan’ di India merupakan sesuatu yang dimaknai dari segi ekonomi, berdasarkan paradigma pembangunan neoliberal yang diterapkan oleh India sejak liberalisasi ekonomi 1991 di bawah arahan Bank Dunia dan IMF. Praktik *land grabbing* pun muncul sebagai upaya India memenuhi kebutuhan tanah yang tinggi untuk industrialisasi, infrastruktur, maupun untuk perdagangan dengan investor asing. Penulis menemukan bahwa hilangnya tanah dari masyarakat akibat praktik *land grabbing* memberikan dampak negatif karena diabaikannya nilai ekonomi, sosial-budaya, dan ekologis tanah bagi masyarakat dalam proses akuisisi, sehingga *land grabbing* dapat dipandang sebagai sebuah ancaman terhadap *human security*. Sebagai pelaku utama praktik *land grabbing*, dalam kasus ini pemerintah India dapat dipandang sebagai sumber ancaman. Hilangnya kepemilikan tanah dari masyarakat turut menghilangkan sumber daya yang penting bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial, dan kerusakan lingkungan yang terjadi dalam proses konversi tanah semakin mengancam kelangsungan hidup bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Pembangunan yang seharusnya menjadi cara untuk mencapai *human security* ternyata justru dalam prosesnya memunculkan sebuah ancaman baru berupa praktik *land grabbing* yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata kunci: land grabbing, human security, pembangunan ekonomi, akuisisi tanah

Abstract

Name : Fransiska Andita

Student ID : 2016330196

Thesis Title : Impacts of Land Grabbing for Economic Development towards Human Security Conditions in India

This study is intended to create an overall picture of the social impacts of land grabbing towards the citizens impacted by the practice. To compliment past studies on land grabbing that focus on specific areas such as economic, legal, and human rights aspects, the writer uses critical security studies and the human security concept as a framework to describe the phenomenon. Both critical security studies and human security emphasize on the need to focus on citizen's individual and communal security in achieving national security. Using the holistic conception of 'development' from the United Nations and the concept of 'land' as an element in development, the writer intends to observe how an economic-centric development strategy impacts the social conditions of citizens. The same dilemma is faced by India, as a country with both rapid economic growth and widespread social problems such as land conflicts. 'Development' in India is highly centered on economic growth, based on the neoliberal paradigm of development that India adopted since the 1991 economic reforms under the World Bank and IMF. Land grabbing as a practice emerged in India's pursuit to fulfill rising demands for land to proceed with development projects such as industrialization and infrastructure construction, and also to fulfill investor demands. The writer finds that land grabbing causes problems to citizens who lost their land, due to the fact that the economic, social, and ecological values of land were disregarded in the process of acquisition by the government. As the primary force of land grabs, the government of India can be seen as a source of threat in this case. The removal of land ownership from civilians simultaneously rids them of a necessary resource to fulfill their economic and social needs, and the environmental degradation suffered during land conversion for development purposes further poses threats to civilians who rely on natural resources. The process of economic development that was intended to achieve human security in fact created a new threat in the form of land grabbing in its execution.

Keywords: land grabbing, human security, economic development, land acquisition

Kata Pengantar

Penelitian ini terinspirasi dari sebuah dilema mendasar: ‘pembangunan, untuk siapa?’. Topik penelitian lahir dari pengamatan pada pembangunan infrastruktur dan industrialisasi yang berlangsung, serta perdebatan yang muncul dari pembuat kebijakan yang menuntut pembangunan dilaksanakan secara masif dan masyarakat yang terkena dampak sosial dan lingkungan dari pelaksanaan proyek. Penulis mengangkat topik *land grabbing* atau akuisisi tanah dalam perspektif keilmuan HI melalui kaca mata human security, dengan membawa studi kasus India sebagai salah satu negara yang tengah gencar membangun infrastruktur dan banyak memiliki kasus *land grabbing*.

Tentunya upaya merangkum dan menganalisis kasus-kasus *land grabbing* yang terjadi di negara sebesar India bukanlah sebuah upaya yang mudah. Maka itu, penulis mengakui masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, baik karena kesulitan menemukan informasi terkait India maupun karena keterbatasan kapabilitas penulis sebagai peneliti. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat mendorong banyak diskusi lainnya mengenai *land grabbing* secara internasional maupun mengenai pembangunan yang ideal itu sendiri. Semoga apa yang belum dapat dilakukan oleh penelitian ini dapat diteruskan oleh para peneliti lainnya.

Akhir kata, penulis bersyukur atas segala kekuatan dan dukungan yang didapat untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Selamat membaca.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Fransiska Andita

Kilas Balik & Terima Kasih

j a k a r t a

Terima kasih pertama saya simpan bagi keluarga J10/6 – Papi, Mami, Imelda, dan Audina – yang sudah bersabar menghadapi saya selama 22 tahun. Privilese terbesar yang saya miliki adalah sepasang orangtua yang selalu mendukung anak-anaknya untuk mencapai mimpi setinggi-tingginya. Saya akui belum jadi anak perempuan yang pantas untuk digantungi harapan. Panjang umur perjuangan membanggakan keluarga.

Skripsi ini saya dedikasikan untuk (Alm.) Ignatius Iming Sujana, Papi tersayang yang pergi sebelum waktunya. Saya bersyukur mewarisi banyak hal dari beliau: dari wajah, idealisme, kegemaran pada ilmu sosial, hingga hasrat untuk terus belajar dari hidup itu sendiri. Maaf atas banyaknya hal yang belum sempat tersampaikan, karena mengira Papi masih akan ada sampai saya resmi sarjana. Terima kasih sudah menjadi orang baik dan benar. Terus jaga kami ya, Pih.

Berikutnya untuk WomenWorks Indonesia, yang ternyata bukan tempat magang biasa namun juga sumber pembelajaran setiap saat. Mana kebayang sih kalau mahasiswi butiran debu ini tiba-tiba bisa bekerja dengan orang-orang sehebat mereka? Terima kasih kepada tim WomenWorks sudah bersabar menghadapi kinerja saya yang suka on-off atau *chaos*, apalagi saat minggu akhir skripsian....hahaha! *Biggest thanks to Alanna for dragging me into the most amazing superheroine team; and to Windy, Wulan, PW, Wina, Stacy, Oci, Shalika, Nadhira, Natasha, and Cindy for making this team what it is.*

b a n d u n g

Bandung adalah rumah kedua saya – mungkin itu mengapa ‘merantau’ ke Bandung sangatlah mudah, dan mengapa terpaksa pamit dari Bandung sebelum waktunya sungguh sangat berat. Saya datang ke HI Unpar tanpa arah dan keluar dengan tujuan baru. Kampus ini memberikan saya kesempatan untuk mengukir diri yang baru, sekaligus menemukan jati diri dan makna. Semua cinta dan harapan yang saya impikan, semuanya ada di Kampus Tiga.

Semua dosen HI Unpar tercinta – terutama Mba Syl sebagai Kaprodi *superwoman*; Mba Prisca yang mengubah perspektif saya terhadap benua Afrika; Mas Giandi yang mengajarkan banyak hal selama bekerja bersama di luar kelas, termasuk tentang empati seorang dosen; Mas Mangadar selaku dosen pembimbing yang luar biasa membantu; serta Mba Ratih dan International Office Unpar yang sudah memberi saya kepercayaan untuk mewakili Unpar sampai ke Kanada. Saya haturkan juga terima kasih dan doa bagi Alm. Mas Bob, Mas Nur, dan Mba Diandra atas kesempatan belajar dari mereka yang singkat namun bermakna.

Paanci – circle yang bikin saya percaya kalau pertemanan sehat itu memang ada. Saya nggak tahu *circle* mana lagi yang bisa bertahan menghadapi humor saya selama empat tahun, auto jadi teman kerja kelompok kalau sekelas (kelas Globis dan KLNRI jadi saksinya), mau kerja serius atau ghibah konyol bisa-bisa aja, dan saling mendukung keambisan masing-masing. Terima kasih kepada Miftahul, Halimah, Ezra PT, Michelle, Joe William, Akmal, Lynn, Robby, Gibril, Alifa, Cahyadi, Angeline, dan Moudy yang menjadi teman pertama saya di HI Unpar.

The Iranian Delegation for Diplomacy in Practice 2019 – atau lebih dikenal sebagai Laskar Taat Beribadah. Sekumpulan orang yang sangat unik, namun juga pekerja keras dan inspiratif. Terima kasih kepada Joe William, Aya, Kenken, Angeline, Naomi, Gianni, Levin, Cindy, Putri, dan Jelny yang sudah menjadi *dream team*, serta sukses menjadikan Prakdip tidak hanya *bearable* namun juga sebuah pengalaman yang membanggakan ☺ salam Ayatollah!

Inkor TAHI 2016 – pengalaman organisasi pertama penulis yang belakangan terbukti menanamkan banyak pelajaran berharga. Super bangga melihat orang-orang yang berjuang bersama saya dalam tawa, tangis, dan gopoh empat tahun silam sekarang sudah mengukir jalannya masing-masing. Alanna, Affi, Ardi, Aretta, Kezia, Aisha, Ara, Endy, Kathleen, Nabilla, Kiko, Reza, Taya, Savitri, Angie, Ignas, Nadya, Moudy, Joe, Robby, Naya, Marika, ditunggu reuninya!

Unpar for HNMUN 2.0. – *we've made our own legacy.* Terima kasih kepada Anton yang rela berjuang menyambung jembatan yang hampir putus, serta Efraim dan Lely yang telah melanjutkan perjuangan Unpar di HNMUN dan mengisi keluarga besar ini dengan orang-orang kocak bin ambisius. Anton, Sisi, Efraim, Acint, Rachel, Ruth, Bella, Deandra, Wisnu Suntoro, Lely, Rizky, Rana, Jepe, Wi(S.H.)nu, Jamie, dan Alya Diva, kapan kita kembali ke Times Square?

HI Unpar 2016 – terima kasih sudah mengajarkan saya untuk melihat lebih dari tampak luar, dan untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Apresiasi lebih saya haturkan untuk mereka yang telah banyak hadir: Alanna Deborah, Immakulata Soraya, Nicander Wijaya, Gabriella Carmen, Brigita Prinsila, Stella Nongka, Veronica Acintya, Celine Budiman, Elizabeth Caroline, Deandra C. Raryarasmu, Hendry Samuel Pangaribuan, dan lainnya.

HMPSIHI UNPAR – *my first real organization.* Secara khusus saya berterima kasih atas kesempatan untuk menjadi bagian dari **Divisi Penelitian & Pengembangan** selama dua periode, bersama orang-orang luar biasa: Yuma, Putri, Sannia, Aretta, Shella, Halimah, Bella, Jepe, Leo, dan Pauline. Untuk Alexa, Reiva, Chika, dan Aldi, selamat melanjutkan perjalanan Litbang.

Unpar for PNMHII XXX – terbang jauh lebih tinggi, hey ya hey ya. Mencoba peruntungan di tahun pertama, tapi ternyata saya diminta Tuhan untuk mendewasakan diri dulu. Akhirnya di tahun ketiga, saya berhasil juga menjadi bagian dari keluarga besar Delegasi Unpar untuk PNMHII. Terima kasih untuk Kenken, Flo, Stella Claresta, Bella, Icat, dan Ruth yang sudah menemani.

Unpar for WorldMUN 2020 – sebuah pelajaran berharga tentang kepemimpinan dan membuat pilihan. Menjadi ketua delegasi kalian di tahun terakhir kuliah sangat menantang, terlebih ketika ketidakpastian justru makin melanda di detik-detik terakhir menuju keberangkatan. Tapi bersama kalianlah saya belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya soal membawa tim ke garis finis, namun juga soal memberikan tim kekuatan dan keberanian untuk tetap berjalan meskipun ketuanya tidak ada. Ari, Jasonia, Nana, Laksmi, Raynard, Jovita, dan Tricia, terima kasih sudah ikut berjuang mencapai Tokyo. Aku sayang kalian semua.

Teman-teman Unpar lainnya – Indira Jauza, Togu Alexander Nadrian, Jessica Andriani Putrono, Ricky Antonius Margareta, Jasmine Feivel, Rifki Fajar Hadiawan, Rahma Dwiherawati, Kezia Natalia Wattie, Naufal Hanif, Giorgio Gatica, Amyra Salsabilla, Yohanes Noel, Nixie Herianto, dan banyak lainnya.

model united nations

Bagi saya, MUN bukan sekadar sebuah kompetisi, namun juga sebuah zona aman yang selalu memberi pelajaran hidup. Komunitas ini tidak hanya menjadi *support system* saya, namun juga menjadi tempat saya menemukan '*purpose*': *to empower others by giving them confidence to go the distance.*

Banyak yang ingin saya ceritakan soal ini, tapi saya takut jadi lebih panjang dari skripsinya...hehehe. Maka saya ingin berterima kasih pada nama-nama ini yang telah menemani saya bertumbuh dan berkembang sebagai delegasi dan pribadi:

Parahyangan MUN Society – *where everything started.* Terima kasih kepada Gugi, Chika, Yuma, Anton, Kezia, Naifa, dan Ko Mike yang membantu saya memulai perjalanan di MUN dan mempercayakan saya dan teman-teman generasi baru untuk melanjutkan perjalanan PMUNS. Terima kasih juga kepada Delegasi Unpar untuk JMUN 2017, JOINMUN 2017, dan JOINMUN 2018 yang sudah membuat perjalanan MUN saya di Unpar sangat menyenangkan.

My dearest MUN friends – Edwin Canggihbrata, Fikri Abirawa, Jeffrey Aruan, Josh Mahawira, Audi Previo, Ingmar Salim, Nadira Saraswati, Leonardi Ryan Andika, Hans Marvin Tanuardi, Michael Jehan, Devina Adisesha, Angelica Wiliانا, Patrick Kurniawan, Rio Putra Hadivatama, Fakhri Abdurrahman, Jesita Wida Ajani, Dominique Virgil, Andrew Prasettya Japri, Anggoro Galuh Pandhito, Caroline Augustine, Cathlin Rosemarie, Wahyu Ramadhan, Andeta Karamina, Heidira Hadayani, Dafiryan Ambardy, Booggy Chapra, Jocelyn Tanya, Nicole Charlene, Mavelaine Theardy, Reynaldo Arya, Kasogi Nurdin, Prily Soetiman, Aurelia Serafina, Edward Candy, Caleb Nathaniel Karim, Royston Long, Phan Xuan Dung, Jason Ong, dan banyak nama yang belum disebutkan.

All my past delegates – *thank you for trusting me as your chairperson.* Terkhusus untuk para ‘anak’: Ievy, Nicole, Nurul, Patty, Salwa, Chika, Aldo, Aurel, Rama, terima kasih sudah mendorong saya untuk terus mewariskan ilmu ini kepada generasi selanjutnya. *I won't burden you with someone else's legacy, but I will pass down to you the things you need to make your own. Go out there, yeah?*

Cucuy Casino Collective – manusia-manusia yang sukses bikin imej MSNS punya Kemenlu yang serius dan prestigius ambyar begitu saja. Udah deg-degan bakal kerja sama diplomat beneran, eh ketemunya sama orang-orang kocak tapi ambis kayak kalian. Lu lagi, lu lagi. Tapi kalian emang paling ngangenin, nggak bohong. Uda, Rachel, Deandra, Indra, Alvis, Alif, Daffa, Fauzan, Thesa, Marsha, Dipta, Rizky, Projo, Rendy, Rafli, *arigato gozaimasu!* (hayo, dibaca yang bener, ya.) Salam satu kasino, salam Cucuy. Ayo nanti kondangan di Novotel Bogor.

Semua follower The Chairy MUNMother – terima kasih sudah mendukung inisiatif kecil ini dan memberikannya makna. Semoga kalian bersedia terus mendukung akun ini untuk dapat mencapai tujuannya: membuka jalan bagi semakin banyak orang untuk pede mengikuti MUN.

newfoundland, canada

Kesempatan menginjakkan kaki di provinsi paling timur Amerika Utara dan merasakan udara Samudra Atlantik tidak akan pernah saya lupakan. Kanada, saya berjanji akan kembali.

Saya berterima kasih kepada semua teman yang telah penulis temui selama empat bulan belajar di Memorial University of Newfoundland. Meski singkat perjumpaan kami, namun lebih dari cukup untuk membuat saya terpana pada keindahan alam dan kehangatan manusia yang membuat saya sanggup bertahan di suhu minus. Terima kasih secara khusus penulis berikan untuk teman-teman PERMIKA St. John's; Coffee Club Internationalization Office; MUN United Nations Society; MUN Catholic Community; Vivian Tao, Jada Jones, dan Mariana Castro Carvajal sebagai teman terdekat saya selama menjalani perkuliahan di MUN; Yu Hang Tan dan Yohei Sakai yang memberi penulis kesempatan untuk bersuka cita dalam musik; serta Timothy Lawrence, Joshua Lauwrich, Andre Santoso, dan Adhitya Ryan Ramadhani selaku teman perjalanan sekaligus *survival kit* selama bertahan hidup di kota St. John's.

Tak lupa saya berterima kasih pada Dr. Sarah Martin, Ph.D. dosen yang membuat perjalanan akademik saya di MUN sangat menyenangkan dengan sikap apresiatif dan semangatnya. *You made this kid who came all the way from Indonesia feel heard and needed, and inspired her to become someone who could do the same.*

Dan tentu saja – kamu! Wahai kamu yang sampai ke skripsi ini karena tersesat di tahun terakhir, percayalah, kamu akan keluar dengan selamat. *This too shall pass.*

Aku tunggu kalian lulus juga.

2016330196, pamit undur diri.

Daftar Isi

PERNYATAAN	
Abstrak	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Kilas Balik & Terima Kasih	iv
Daftar Isi	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.2.1. Deskripsi Masalah	5
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	7
1.2.3. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
1.4. Kajian Pustaka	9
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.6.1. Metode Penelitian	19
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data	19
1.7. Sistematika Pembahasan.....	20
Bab II	21
Perspektif Pembangunan Global dan Munculnya Fenomena <i>Land Grabbing</i>	21
II.1 Diskursus Ekonomi Pembangunan Kontemporer	21
II.1.1. Evolusi Paradigma Pembangunan Global	21
II.1.3. Munculnya Pendekatan Pembangunan Alternatif	25
II.2 Pembangunan dan Lingkungan Hidup	31
II.2.1. Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pembangunan.....	31
II.2.2. <i>Land Grabbing</i> sebagai Sebuah Fenomena Global.....	32
II.3. Paradigma Pembangunan di India.....	35
II.3.2 Nilai Ekonomi Tanah di India.....	38

II.3.3. Nilai Sosial-Budaya Tanah di India	40
II.3.4 Aturan Kepemilikan Tanah di India.....	42
BAB III.....	45
Dampak Praktik <i>Land Grabbing</i> terhadap <i>Human Security</i> Masyarakat India	45
3.1. Land Grabbing sebagai Bagian dari Industrialisasi India	45
3.1.1 Neoliberalisasi India di bawah Bank Dunia dan IMF.....	45
3.1.2. Bertahannya Neoliberalisme dalam Pembangunan India (2000-2018)	50
3.2. Proses dan Justifikasi Praktik <i>Land Grabbing</i>	55
3.3. Analisis melalui Pilar-Pilar <i>Human Security</i>	64
3.3.1 Pilar pertama: <i>freedom from fear</i> (keamanan dari ancaman fisik)	65
3.3.2. Pilar kedua: <i>freedom from want</i> (kebebasan dari kekurangan).....	67
3.3.3. Pilar ketiga: <i>freedom from hazard impact</i> (keamanan dari dampak kerusakan lingkungan).....	70
3.5. Pembangunan dan <i>Human Security</i> di India: Ekspektasi vs Realita.....	74
Bab IV	77
Kesimpulan.....	77
Daftar Pustaka.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya negara mencapai kekuatan ekonomi dan kondisi sosial domestik dianggap saling berhubungan, baik hubungan positif maupun negatif. Sebelumnya, negara-negara Eropa dan Amerika Utara mencapai kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan luar biasa melalui industrialisasi dan pasar bebas. Setelahnya, paradigma pembangunan ala Barat ini berusaha diimplementasikan ke negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan pasca gelombang kemerdekaan di masa Perang Dingin, dengan harapan bahwa negara-negara baru tersebut dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang setara dengan negara-negara maju, serta dapat mencapai status yang serupa dalam tatanan internasional. Namun, pembangunan ekonomi ala Barat juga dikritik karena mempertegas ketimpangan antara masyarakat kota dan desa, serta menimbulkan banyak masalah sosial dan lingkungan dalam prosesnya. Tidak heran bahwa situasi sosial dan lingkungan masih menjadi dilema dalam pembangunan di negara-negara berkembang, dan mengganjal upaya negara-negara berkembang untuk mengejar kekuatan ekonomi serta meningkatkan stratanya dalam tatanan internasional.

India merupakan salah satu negara yang tengah mengejar pertumbuhan ekonomi pesat guna menjadi negara *superpower* baru. Sebelumnya, ekonomi India bersifat proteksionis, guna menghindari kolonialisme dan eksploitasi yang dikhawatirkan

akan terulang jika India membuka diri pada pasar internasional.¹ Dengan pembatasan impor dan investasi asing, fokus pada pasar lokal, dan nasionalisasi sektor-sektor usaha seperti telekomunikasi dan listrik, India menjadi ‘panutan ekonomi sosialisme Dunia Ketiga’, berkat keberhasilan pemerintah India meningkatkan sektor industri dan agrikultur lewat regulasi ketat, subsidi, dan upaya redistribusi tanah bagi petani.

Berhubungan dengan ideologi kemandirian ekonomi atau *swadesi* yang diusung India, sebelum dekade 1990, hubungan antara India dan Bank Dunia masih sebatas peminjaman dana untuk sektor pertanian. Namun, krisis neraca pembayaran nasional pada tahun 1991 memaksa India untuk mencari bantuan guna menyelamatkan diri dari kebangkrutan. Kala itu, India nyaris bangkrut karena depresiasi mata uang rupee dan hutang yang terus menumpuk hingga mencapai 72 milyar dolar AS.² Menyadari kritisnya kondisi ekonomi India tanpa cadangan uang yang cukup, Perdana Menteri P.V. Narasimha Rao mengajukan pinjaman bersyarat (*structural adjustment loan*) sebanyak 250 milyar dolar AS ke Bank Dunia, yang disertai dengan berbagai syarat reformasi kerangka makroekonomi serta perubahan kebijakan yang mendorong India untuk melakukan liberalisasi.³ Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Rao memang menjadi

¹ “BBC NEWS | World | South Asia | India: The Economy,” accessed October 15, 2019, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/55427.stm.

² Bernard Weinraub, “Economic Crisis Forcing Once Self-Reliant India to Seek Aid,” *The New York Times*, June 29, 1991, sec. World, <https://www.nytimes.com/1991/06/29/world/economic-crisis-forcing-once-self-reliant-india-to-seek-aid.html>.

³ World Bank, “Report and Recommendation of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association to the Executive Directors on a Proposed Structural Adjustment Loan in an Amount Equivalent to US 250 Million and on a Proposed Structural Adjustment Credit in an Amount Equivalent to SDR 183.8 Million to India” (The World Bank Group, November 12, 1991).

fondasi bagi pertumbuhan ekonomi India yang pesat, namun keputusan India saat itu juga mengundang kontroversi karena berbelok dari sikap anti-kolonial India, serta kekhawatiran akan terkikisnya kedaulatan ekonomi India dalam proses liberalisasi.

Terlepas dari kontroversi awal yang ditimbulkan dari keputusan membuka perekonomian, reformasi ekonomi yang dilakukan India ternilai sukses meningkatkan strata India di tatanan internasional. Pada tahun 2018, PDB India telah mencapai 2.726 triliun, nilai ketujuh terbesar di dunia menurut data Bank Dunia.⁴ India kerap disebut sebagai *'fastest growing economy'* karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai rerata 7 persen selama 15 tahun terakhir. Namun, pertumbuhan ekonomi India yang pesat masih ternodai masalah sosial yang merajalela, yakni kesenjangan sosial dan kemiskinan. Meski India telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 50 persen sejak tahun 1990⁵, tetapi pertumbuhan ekonomi yang pesat masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Menurut laporan dari Oxfam, 77 persen dari kekayaan nasional India dimiliki oleh 10 persen populasi India.⁶ Pada tahun 2017, 73 persen dari kekayaan nasional di India dipegang oleh 1 persen orang-orang terkaya di India, sementara 67 juta populasi termiskin di India hanya merasakan peningkatan

⁴ World Bank, "GDP per Capita (Current US\$)," World Bank, 2018, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=ZG&most_recent_value_desc=true.

⁵ "India Halved Its Poverty Rate since 1990s: World Bank," *The Economic Times*, October 16, 2019, sec. Economy, <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/india-halved-its-poverty-rate-since-1990s-world-bank/articleshow/71608220.cms>.

⁶ Oxfam International, "India: Extreme Inequality in Numbers," accessed October 20, 2019, <https://www.oxfam.org/en/even-it/india-extreme-inequality-numbers>.

1 persen terhadap kekayaan mereka.⁷ Di tengah upaya India meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sektor industri, pembangunan infrastruktur, dan mengundang investasi asing, persebaran kesejahteraan yang belum merata menjadi isu sosial yang masih mengganjal upaya India untuk meningkatkan kemampuan ekonomi guna menjadi negara *superpower*.

Kondisi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang bersanding dengan pertumbuhan ekonomi pesat memicu pertanyaan terkait pembangunan yang ideal. Bagi ideologi pembangunan internasional yang berorientasi ekonomi, pembangunan dimaknai dalam bentuk penghasilan atau profit dari proyek yang dilaksanakan. Dampak sosial dan ekologis dari proyek dianggap sebagai bentuk pengorbanan yang tidak terelakkan dan baru hendak dibetulkan ketika sudah terjadi, bukan sebagai sesuatu yang perlu diperkirakan dan difaktorkan dalam analisis biaya dan manfaat sebuah proyek.⁸ Maka, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh proses pembangunan dianggap sebagai *trade-off* atau pengorbanan yang perlu dibuat oleh negara. Sebaliknya, bagi LSM yang berbasis ideologi *environmentalism*, pembangunan perlu menjunjung tinggi keadilan sosial dan menjaga keutuhan komunitas sosio-kultural masyarakat, serta memiliki kesadaran terhadap konteks alam dan budaya dari daerah lokasi proyek.⁹ Aspek perlindungan sosial dan lingkungan merupakan isu hak asasi manusia yang perlu diperhitungkan dalam

⁷ Oxfam International.

⁸ Pat Aufderheide and Bruce Rich, "Environmental Reform and the Multilateral Banks," *World Policy Journal* 5, no. 2 (1988): 301–21, <https://www.jstor.org/stable/40209084>.

⁹ Aufderheide and Rich.

proses perencanaan dan pelaksanaan proyek, guna menciptakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pertentangan antara idealisme dan realita pembangunan inilah yang mendasari penelitian ini.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Proses India meningkatkan kekuatan ekonomi dengan melakukan industrialisasi besar-besaran dan meliberalisasi ekonomi nasional tidak lepas dari berbagai dampak sosial. Praktik *land grabbing* atau akuisisi tanah skala besar menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi pemerintah dengan kepentingan masyarakat sipil, terutama masyarakat miskin. Di satu sisi, India dituntut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mengantisipasi pertumbuhan populasi dan menyokong pertumbuhan ekonomi, serta meringankan izin kepemilikan tanah guna memudahkan masuknya investasi asing. Namun di sisi lain, India juga dihadapkan dengan gesekan antara pemerintah India dengan masyarakat sipil dan LSM lingkungan, karena kerugian yang ditimbulkan praktik *land grabbing* untuk pembangunan infrastruktur publik maupun swasta.

Dewan HAM PBB mengategorikan tanah sebagai salah satu elemen penting bagi pemenuhan hak ekonomi dan hak sosial-budaya manusia, karena menyangkut kesejahteraan dan identitas budaya manusia.¹⁰ Organisasi internasional yang kerap membantu proyek pembangunan, seperti Bank Dunia dan

¹⁰ UN Office of the High Commissioner of Human Rights, "Land and Human Rights," OHCHR, accessed October 20, 2019, <https://www.ohchr.org/EN/Issues/LandAndHR/Pages/LandandHumanRightsIndex.aspx>.

Program Pembangunan PBB (UNDP), juga telah memiliki panduan kerja untuk mencegah maupun meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan dari proyek pembangunan yang dilaksanakan. Dengan kondisi bahwa tanah merupakan sumber daya yang penting sekaligus paling langka di India¹¹, praktik *land grabbing* pun memunculkan perselisihan atau sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh, pada tahun 2011, para petani di daerah Noida dan Greater Noida memprotes akuisisi tanah mereka oleh pemerintah India untuk membangun jalan raya Yamuna Expressway.¹² Para petani menuntut kompensasi finansial dari pemerintah sesuai nilai penjualan tanah dan nilai hasil pertanian yang hilang karena tanah diberikan ke pemerintah. Proses akuisisi tanah untuk Yamuna Expressway melibatkan konflik fisik antara para petani dan aparat kepolisian, yang memakan 8 korban jiwa dan 100 orang hilang.¹³

Selain itu, penggusuran akibat proses pembangunan atau *development-induced displacement* juga menjadi bagian dari proses akuisisi tanah yang dilakukan. Banyaknya proyek pembangunan di India turut berkontribusi pada banyaknya penggusuran yang terjadi untuk tanah. Contohnya, pembangunan Bendungan Sardar Sarovar, bendungan hidroelektrik terbesar di India, diperkirakan akan menggusur 90,000 orang ketika direncanakan pada tahun 1985; pelaksanaan konstruksi sejak tahun 1987 berujung menggusur hampir 120,000

¹¹ Sanjoy Chakravorty, "Why Is India Facing Growing Conflict over Land?," *BBC News*, March 17, 2015, sec. India, <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-31705131>.

¹² Ashish Tripathi, "Farmers Affected by Yamuna Expressway May Also Go to Court | India News - Times of India," *The Times of India*, October 22, 2011, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/Farmers-affected-by-Yamuna-Expressway-may-also-go-to-court/articleshow/10455587.cms>.

¹³ Ajoy Ashirwad Mahaprashasta, "Fight for Land," *Frontline*, June 21, 2011, <https://frontline.thehindu.com/static/html/fl2811/stories/20110603281112500.htm>.

orang.¹⁴ Sampai tahun 2019 ini, masyarakat yang terdusur akibat pembangunan Bendungan Sardar Sarovar masih menderita karena terpaksa pindah ke daerah lain setelah desa mereka terendam air dari bendungan.¹⁵ Warga desa juga terpaksa berganti pekerjaan dari petani menjadi pekerja bangunan, karena mereka tidak punya lagi lahan untuk bertani.¹⁶ Terlihat bahwa masyarakat yang kehilangan tanah tidak memiliki jaminan bahwa mereka dapat mencapai tingkat pendapatan yang sama seperti dulu. Tidak adanya kepastian kompensasi dari pemerintah atas nilai ekonomi dari tanah yang hilang turut mempersulit hidup masyarakat yang terdusur dan membuat mereka berada dalam kondisi ketidakpastian sosial dan ekonomi. Melihat target India untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, masalah *land grabbing* akibat pembangunan yang terjadi di India merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dalam sudut pandang pertentangan keamanan ekonomi India dengan keamanan manusia masyarakatnya.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengkaji praktik akuisisi tanah yang dilakukan oleh pemerintah India untuk keperluan ekonomi, seperti untuk membangun infrastruktur, membuka perkebunan, untuk diberikan pada investor asing, dan sebagainya. Penelitian ini dimulai pada tahun 2000 guna melihat bagaimana berjalannya liberalisasi ekonomi pada dekade baru. Waktu penelitian dibatasi sampai tahun 2018, yakni akhir dari periode pertama Narendra Modi sebagai

¹⁴ Bruce Rich, "The Emperor's New Clothes: The World Bank and Environmental Reform," *World Policy Journal* 7, no. 2 (1990): 305–29, <https://www.jstor.org/stable/40209149>.

¹⁵ Rohini Mohan, "Madhya Pradesh Villagers Displaced by Sardar Sarovar Dam Wait in Tin Sheds for New Life," *The Hindu*, October 4, 2019, sec. Society, <https://www.thehindu.com/society/madhya-pradesh-villagers-displaced-by-sardar-sarovar-dam-wait-in-tin-sheds-for-new-life/article29596657.ece>.

¹⁶ Mohan.

Perdana Menteri India, untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan ekonomi Modi selama paruh pertama jabatannya.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian berupa: **“Bagaimana kondisi *human security* masyarakat India terkena dampak dari terjadinya praktik *land grabbing* untuk tujuan pembangunan ekonomi?”**

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan praktik *land grabbing* yang terjadi akibat upaya pembangunan ekonomi di India, serta merumuskan hubungannya dengan kondisi *human security* masyarakat yang kehilangan tanahnya akibat terkena *land grabbing*.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat membantu pembaca memahami dilema antara upaya negara meningkatkan perekonomian yang justru membahayakan situasi *human security* masyarakat, dengan menyorot fenomena *land grabbing* juga sedang terjadi di banyak negara berkembang. Penggunaan perspektif *human security* diharapkan dapat membantu pembaca untuk memahami bagaimana *land grabbing* juga menjadi sebuah isu internasional.

1.4. Kajian Pustaka

Untuk memperdalam penelitian ini, penulis mengkaji beberapa artikel jurnal yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya tanah bagi negara dan masyarakat, serta memberikan fondasi untuk membangun hubungan antara kepemilikan tanah dengan pemenuhan kondisi sosial masyarakat.

Peran tanah bagi perekonomian negara berkembang dieksplor dalam artikel jurnal berjudul '*Mutual Effects of Land Distribution and Economic Development: Evidence from Asia, Africa, and Latin America*' karya Hossein Azadi dan Eric Vanhaute. Tanah merupakan sebuah aset penting bagi masyarakat agraris, sehingga ia memiliki peran signifikan bagi perekonomian negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada sektor pertanian. Akses masyarakat terhadap tanah adalah elemen penting dalam pemerataan dan peningkatan kesejahteraan, terlebih bagi golongan yang rawan seperti masyarakat miskin, masyarakat adat, maupun perempuan.¹⁷ Maka, distribusi tanah yang adil dan merata serta pemakaian lahan yang efisien sangat penting bagi pembangunan ekonomi, dalam kasus ini melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian.¹⁸

Isu hak kepemilikan tanah dan penggusuran dalam rangka proyek pembangunan merupakan dilema yang lazim dihadapi negara berkembang. Dalam artikel jurnal berjudul '*"In the Public Interest": Forced Evictions, Land Rights and Human*

¹⁷ Hossein Azadi and Eric Vanhaute, "Mutual Effects of Land Distribution and Economic Development: Evidence from Asia, Africa, and Latin America," *Land* 8, no. 6 (June 15, 2019): 96, <https://doi.org/10.3390/land8060096>.

¹⁸ Azadi and Vanhaute.

Development in Africa, Paul D. Ocheje menyorot mengenai bagaimana penggusuran warga demi mendapat tanah untuk pembangunan acapkali dijustifikasi dengan alasan ‘kepentingan umum’. Ocheje mengkritik bagaimana pembangunan berdasar paradigma *developmentalism* – yang berfokus pada keuntungan ekonomi melalui urbanisasi dan eksploitasi sumber daya – hanya mengukuhkan peninggalan kebijakan pembangunan kolonial, yang beranggapan bahwa pengembangan daerah urban dibutuhkan untuk ‘mengangkat derajat’ masyarakat miskin. Dinamika pembangunan kolonial tersebut terlihat dari bagaimana pemerintah menjustifikasi penggusuran dan pengambilan tanah yang dilakukan dengan alasan ‘kepentingan umum’.¹⁹ Padahal, hilangnya kepemilikan tanah menimbulkan kerugian multisektoral yang menghambat masyarakat dari menikmati hidup yang bebas dan bermartabat (*a life of liberty and dignity*). Penggusuran untuk pembangunan juga menghambat masyarakat dari memenuhi hak asasi manusia (HAM) yang terasosiasi dengan kepemilikan tanah, terutama hak atas tempat tinggal (*rights to housing*) dan hak atas standar hidup yang layak (*rights to a standard of living adequate for health and wellbeing*), yang masing-masing telah dikodifikasi dalam hukum internasional dan prinsip universal HAM. Dengan demikian, penggusuran dan pengambilan tanah yang dilakukan oleh pemerintah bertentangan dengan HAM, dan maka itu bersifat ilegal apabila tidak disertai dengan kompensasi yang setimpal dengan kerugian yang diderita masyarakat.²⁰ Kebijakan pembangunan yang memberatkan kepemilikan tanah

¹⁹ Paul D. Ocheje, “‘In the Public Interest’: Forced Evictions, Land Rights and Human Development in Africa,” *Journal of African Law* 51, no. 2 (2007): 173–214, <https://www.jstor.org/stable/27607987>.

²⁰ Ocheje.

rakyat kecil hanya akan meningkatkan kesenjangan ekonomi dan mencegah mereka mencapai emansipasi hidup.

Artikel jurnal ketiga berjudul '*Large-Scale Land Acquisitions, Livelihoods and Human Rights in South-East Asia*' karya Christophe Gironde dan Christophe Golay mengukuhkan argumen yang dibuat oleh Ocheje terkait dampak akuisisi tanah terhadap kesejahteraan dan HAM masyarakat. Akuisisi tanah merupakan hasil dari komodifikasi hak tanah masyarakat dan dipengaruhi oleh hukum kolonial terkait kepemilikan tanah, yang memberikan pemerintah monopoli atas kepemilikan tanah, sekaligus membahayakan hak tanah turun temurun milik masyarakat.²¹ Meskipun masyarakat lokal dijanjikan keuntungan dari pembangunan infrastruktur yang hendak dijalankan, namun pelaksanaan proyek membuktikan sebaliknya. Dalam proses negosiasi, pemerintah maupun investor kerap meragukan legitimasi hak tanah masyarakat lokal yang dicapai secara historis melalui penggunaan tanah pra-kolonial, serta institusi adat yang mengatur kepemilikan tanah tersebut.²² Dampak ekonomi dan sosial dari akuisisi tanah pada masyarakat pemilik tanah akan dipengaruhi juga oleh keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah maupun investor selama perencanaan proyek – contohnya, proses konsultasi akan meminimalisasi resiko terjadinya sengketa. Namun, kehilangan aset berupa tanah tetap akan mempengaruhi pencapaian HAM oleh masyarakat lokal, seperti hak atas makanan, hak masyarakat adat atas tanah dan

²¹ Christophe Gironde and Christophe Golay, "Large-Scale Land Acquisitions, Livelihoods and Human Rights in South-East Asia," in *Large-Scale Land Acquisitions*, ed. Peter Messerli, Focus on South-East Asia (Brill, 2016), 275–92, <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76v19.19>.

²² Gironde and Golay.

sumber daya alam, hak atas pemukiman, hak untuk tidak digusur, dan hak atas air.²³ Terhambatnya pemenuhan hak-hak ini akan merambat juga pada pemenuhan HAM lainnya, sehingga mencegah masyarakat menikmati hidup yang layak.

Keseluruhan artikel jurnal yang penulis kaji mendukung argumen penulis bahwa kepemilikan tanah tidak hanya penting bagi kepentingan negara, namun juga merupakan sesuatu yang vital bagi pemenuhan *human security* masyarakat. Namun, dibandingkan artikel jurnal di atas yang fokus pada aspek ekonomi, hukum, dan HAM, penulis fokus pada dualitas hakikat pembangunan yang ideal dengan realita dari pelaksanaan proses pembangunan. Perbedaan utama adalah bagaimana penulis menggunakan pilar-pilar *human security* untuk menunjukkan bagaimana efek kehilangan tanah tidak hanya berpengaruh pada kerugian ekonomi namun juga kerugian sosial dan politik.

1.5. Kerangka Pemikiran

Salah satu pertanyaan mendasar yang hendak dijawab studi Hubungan Internasional adalah mengapa negara berperilaku dengan cara-cara tertentu. Menurut asumsi Realisme, perilaku negara dipengaruhi oleh dorongan untuk mencapai keamanan nasional (*national security*), yakni kondisi dimana negara bebas dari ancaman terhadap dirinya.²⁴ Untuk mencapai keamanan nasional, negara membutuhkan *power*, yakni kapabilitas untuk mempengaruhi perilaku

²³ Gironde and Golay.

²⁴ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, 5th Ed. (Pearson Education, Inc., 2012).

negara lain melalui paksaan atau unjuk kekuatan.²⁵ Dalam Realisme, *power* dipahami sebagai kapabilitas material (ekonomi dan militer) yang relatif dengan negara lain dan memberinya kemampuan untuk memberi pengaruh.²⁶

Namun, apabila asumsi Realisme menganggap bahwa keamanan dicapai hanya dengan peningkatan *power* secara militer dan ekonomi, perubahan situasi internasional pasca Perang Dingin memperlihatkan bahwa pencapaian keamanan nasional juga memerlukan langkah non-militer untuk melindungi masyarakat dalam sebuah negara. Banyaknya masalah transnasional yang tidak dapat ditangani dengan oleh militer, seperti wabah penyakit, bencana alam, kelaparan, kemiskinan, dan sebagainya mendorong adanya pelebaran definisi keamanan dan ancaman itu sendiri. *National security* bukan lagi hanya perihal keamanan teritorial, tetapi juga bagaimana negara dapat mempertahankan masyarakat dari ancaman terhadap hidup mereka, sehingga kestabilan negara akan terjaga. Perkembangan tersebut menjadi sorotan dari *critical security studies*, yang mengkritik bagaimana studi keamanan tradisional terlalu menitikberatkan negara sebagai objek keamanan dan tidak dapat menjelaskan ancaman non-militer pada manusia sebagai individu dan masyarakat.²⁷ Bagi *critical security studies*, keamanan manusia dalam suatu negara sama pentingnya dengan keamanan negara secara teritorial. Menurut Ken Booth, bentuk keamanan yang perlu dicapai adalah ‘emansipasi’, yakni terbebasnya manusia dari keterbatasan fisik dan sosial yang

²⁵ Viotti and Kauppi.

²⁶ Viotti and Kauppi.

²⁷ K. M. Fierke, “Critical Theory, Security, and Emancipation,” *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*, March 1, 2010, <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.138>.

menghambat mereka dari mencapai hidup yang layak dan adidaya.²⁸ Booth beranggapan bahwa emansipasi dan keamanan tidak terpisahkan dan justru saling mendukung. Di satu sisi, keamanan memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup guna mencapai emansipasi, karena keamanan berarti masyarakat terbebas dari ancaman akan hidup mereka.²⁹ Di sisi lain, pencapaian emansipasi memerlukan perubahan pemahaman soal keamanan, agar pembuatan kebijakan untuk keamanan tidak berujung menciptakan keadaan yang tidak aman untuk masyarakat.³⁰ Pendekatan emansipasi menempatkan pemenuhan rasa aman manusia secara individu sebagai pedoman moral dalam pembuatan kebijakan keamanan.

Cara untuk mencapai emansipasi yang dituju oleh *critical security studies* adalah melalui pendekatan *human security*. Komisi Keamanan Manusia PBB mendefinisikan *human security* sebagai ‘perlindungan terhadap hak dan kebebasan asasi untuk meningkatkan kebebasan manusia dan pemenuhan tujuan hidup’ dengan cara ‘menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang memberikan manusia batu fondasi keselamatan, mata pencaharian, dan martabat’.³¹ Untuk mencapai *human security*, manusia harus terlindungi dari ancaman berupa konflik dan kekerasan (*freedom from fear*), serta terhindar dari guncangan terhadap pola hidup sehari-hari mereka, seperti kemiskinan dan

²⁸ Ken Booth, “Security and Emancipation,” *Review of International Studies* 17, no. 4 (1991): 313–26, <https://www.jstor.org/stable/20097269>.

²⁹ Booth.

³⁰ Booth.

³¹ Commission on Human Security, ed., *Human Security Now: Protecting and Empowering People* (New York, 2003), p. 6.

kelaparan (*freedom from want*).³² Selain kondisi sosial, diskursus terkait lingkungan dan *human security* memunculkan pilar ketiga, yakni *freedom from hazard impact* atau keamanan masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan, baik karena sebab alamiah ataupun karena dipicu aktivitas manusia.³³ Dengan demikian, *human security* melihat bahwa ancaman keamanan bukan hanya datang dari luar (dari negara lain) namun juga bisa dari dalam (dari negara atau alam). Meskipun idealnya negara menjadi *security provider* atau penyedia keamanan bagi masyarakat, tidak jarang negara menjadi sumber ancaman terhadap *human security* ketika upaya pemenuhan keamanan nasional justru mengesampingkan kesejahteraan individu.³⁴

Untuk dapat mewujudkan tiap aspek *human security*, negara mengejar adanya pembangunan (*development*). PBB mendefinisikan pembangunan sebagai ‘sebuah upaya multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang’ melalui pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, dan konservasi lingkungan.³⁵ Sebelum dekade 1990, pembangunan diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara, yang menjadi *economic development* (pembangunan ekonomi). Metode pembangunan ekonomi yang banyak diterapkan pada negara-negara berkembang atau *third world countries* didasari oleh paradigm *developmentalism*. Menurut *developmentalism*,

³² UNDP, ed., *Human Development Report 1994* (New York: Oxford Univ. Press, 1994).

³³ Hans Günter Brauch, *Environment and Human Security: Towards Freedom from Hazard Impacts* (Bonn: United Nations University, Institute for Environment and Human Security, 2005).

³⁴ Edward Newman, “Critical Human Security Studies,” *Review of International Studies* 36, no. 1 (2010): 77–94, <https://www.jstor.org/stable/40588105>.

³⁵ General Assembly resolution 51/240, *Agenda for development*, A/RES/51/240 (15 October 1997), available from https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/240

modernisasi ekonomi melalui industrialisasi, peningkatan produksi, serta pembukaan pasar bebas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan, sekaligus meningkatkan posisi sebuah negara di tatanan internasional.³⁶ *Developmentalism* meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan legitimasi pemerintahan, karena kekuatan ekonomi yang dibangun melalui pembangunan akan menunjukkan bahwa sebuah negara memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara maju sekaligus dapat memenuhi *human security* masyarakatnya. Namun, dari segi *human security*, kecukupan materi tidak akan berarti tanpa otonomi atas hidup pribadi dan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan, sehingga pembangunan ekonomi tetap harus memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat.³⁷

Kondisi lingkungan merupakan komponen penting bagi kelangsungan hidup dan pembangunan, terutama sebagai penyedia sumber daya bagi aktivitas ekonomi.³⁸ Dari sudut pandang ekonomi, ‘sumber daya’ atau ‘*resource*’ didefinisikan sebagai ‘segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia’, baik secara langsung maupun untuk memproduksi barang dan jasa.³⁹ Tanah (*land*) merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tanah mencakup area geografis bumi (*soil*) dan bentuk-bentuknya serta

³⁶ Tony Smith, “Requiem or New Agenda for Third World Studies?,” *World Politics* 37, no. 4 (1985): 532–61, <https://doi.org/10.2307/2010343>.

³⁷ Caroline Thomas, “Global Governance, Development and Human Security: Exploring the Links,” *Third World Quarterly* 22, no. 2 (2001): 159–75, <https://www.jstor.org/stable/3993404>.

³⁸ Norman Myers, “Environment and Security,” *Foreign Policy*, no. 74 (1989): 23–41, <https://doi.org/10.2307/1148850>.

³⁹ Kent Hughes Butts, “Geopolitics of Resource Scarcity,” *Penn State Journal of Law and International Affairs*, The 9 Billion People Question: The Challenge of Global Resource Scarcity, 3, no. 2 (2015): 3.

sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti cadangan bahan tambang (mineral dan minyak), air permukaan (sungai dan danau) maupun air tanah, serta binatang dan tumbuhan.⁴⁰ Tanah adalah sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan pembangunan. Bagi manusia, tanah memiliki beragam kegunaan: sebagai pasokan air dan bahan-bahan alam untuk keperluan sandang dan pangan; tempat manusia membangun tempat tinggal ataupun melakukan aktivitas ekonomi seperti bercocok tanam, berdagang, dan membangun industri dan infrastruktur; sumber mineral dan bahan mentah untuk pengolahan; serta menyimpan bukti atau rekam jejak prehistoris seperti fosil dan peninggalan antropologis.⁴¹

Untuk mendapat lahan untuk pembangunan, negara melakukan akuisisi tanah (*land acquisition*). Akuisisi tanah adalah proses klaim pemerintah atau perusahaan terhadap tanah milik individu, yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Akuisisi tanah dalam skala besar disebut juga sebagai *land grabbing*, dengan konotasi bahwa akuisisi tersebut dilakukan untuk kepentingan ekonomi. *Land grabbing* merupakan salah satu bentuk kekurangan pembangunan berdasarkan paradigma *developmentalism*, yang cenderung memperlakukan alam dan manusia sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi sebanyak yang diperlukan, serta memomorduakan kondisi sosial demi pertumbuhan ekonomi.⁴² Proses penggunaan tanah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi akan mengubah keseimbangan

⁴⁰ Food and Agriculture Organization, "Land Resources and People: Dependence and Interaction," *The Approach - Facing the Challenge*, 1997, <http://www.fao.org/3/x3810e/x3810e04.htm>.

⁴¹ Food and Agriculture Organization.

⁴² Lakshman Yapu, Ben Wisner, and Henry R. Luce, "Building a Case Against Economic Development," *GeoJournal* 35, no. 2 (1995): 105–18, <https://www.jstor.org/stable/41146390>.

ekologis, yang dalam jangka panjang akan merusak kondisi lingkungan.⁴³ Kerusakan kondisi lingkungan dan eksploitasi sumber daya dalam jangka panjang akan menimbulkan kondisi *scarcity* atau kelangkaan, yaitu ketidakseimbangan antara cadangan sumber daya dengan kebutuhan akan sumber daya tersebut. Lebih spesifik, terdapat istilah *environmental scarcity* yang mengacu kepada kelangkaan sumber daya alam terbarukan seperti air dan hutan, yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.⁴⁴ *Land grabbing* tidak hanya akan menimbulkan *environmental scarcity* terhadap sumber daya vital seperti air dan makanan, namun juga dapat menceraikan komunitas sosial-budaya dalam proses perampasan tanah dan penggusuran yang dilakukan serta menurunkan pendapatan masyarakat yang tergusur.⁴⁵ Dengan demikian, *land grabbing* merupakan fenomena yang membahayakan *human security* masyarakat, karena menghalangi mereka dari memenuhi kebutuhan hidup (*freedom from want*), memberikan rasa tidak aman dalam hidup sehari-hari (*freedom from fear*), serta menimbulkan dampak ekologis yang membahayakan hidup masyarakat (*freedom from hazard impact*).

⁴³ D. Raghunandan, "Environment and Development under Capitalist Globalisation," *Social Scientist* 31, no. 9/10 (2003): 36–57, <https://doi.org/10.2307/3518135>.

⁴⁴ Thomas F. Homer-Dixon, "Key Research Concepts, Methods, and Goals," in *Environmental Scarcity and Violence* (New Jersey: Princeton University Press, 1999), 8–10.

⁴⁵ Bogumil Terminski, "Development-Induced Displacement and Human Security: A Very Short Introduction," *SSRN Electronic Journal*, 2012, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2182302>.

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif menggunakan deskripsi atau narasi untuk menyajikan hasil penelitian.⁴⁶ Sumber data yang dipakai adalah studi kasus, studi pustaka, maupun wawancara untuk mengumpulkan data deskriptif atau numerik. Penelitian kualitatif seringkali dilakukan dalam lingkup kecil, tetapi tetap bergantung pada kondisi lapangan dalam melakukan penelitian.⁴⁷

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode narasi. Metode narasi akan digunakan untuk merangkai data deskriptif yang didapat dari buku, artikel jurnal, dan artikel berita, maupun untuk menjelaskan hasil analisis.⁴⁸ Dengan menggunakan metode narasi, penulis dapat menggambarkan fenomena yang dikaji dan menjawab pertanyaan penelitian.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dari sumber-sumber deskriptif seperti buku, artikel jurnal, artikel berita, maupun laporan dan publikasi dari organisasi internasional dan lembaga riset. Selain itu, penulis juga melihat dokumen negara seperti undang-undang dan kebijakan kepemilikan tanah yang ada di India, maupun dokumen-dokumen terkait HAM dan hak tanah, guna membangun hubungan antara variabel-variabel yang dikaji.

⁴⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

⁴⁷ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), p. 18-19.

⁴⁸ Umar Suryadi Bakry, 113.

1.7. Sistematika Pembahasan

- **Bab 1** berisi **Pendahuluan** yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah (Deskripsi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah), Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.
- **Bab 2** akan membahas **Perspektif Pembangunan Global dan Munculnya Fenomena *Land Grabbing***. Penulis akan menggali paradigma pembangunan global dan munculnya paradigma pembangunan alternatif sebagai tanggapan terhadap dampak negatif paradigma pembangunan yang ada. Penulis juga akan mendeskripsikan paradigma pembangunan di India serta nilai ekonomi dan sosial-budaya tanah bagi masyarakat India.
- **Bab 3** akan menganalisis **Dampak *Land Grabbing* untuk Pembangunan Ekonomi terhadap *Human Security* Masyarakat India**. Penulis akan mendeskripsikan bagaimana *land grabbing* muncul dari perubahan kebijakan pembangunan di India, serta mengapa praktik *land grabbing* dijustifikasi. Bab ini akan menganalisis dampak negatif praktik *land grabbing* dari perspektif *human security*.
- **Bab 4** berisi **Kesimpulan** dari upaya penulis menjawab pertanyaan penelitian.

